



Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Iwan Ahmad Puji Santoso

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Di era digital, penerapan digitalisasi dalam pemerintahan menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola publik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui sistem e-Government, e-Services, serta platform digital lainnya memungkinkan pemerintahan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran digitalisasi dalam memperkuat prinsip-prinsip Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat memberikan akses lebih besar kepada masyarakat terhadap informasi penting, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mempercepat proses administrasi. Meskipun digitalisasi memberikan banyak peluang, tantangan terkait infrastruktur yang belum merata, literasi digital yang rendah, dan ancaman keamanan siber tetap menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi digitalisasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan analisis kasus guna memberikan gambaran tentang dampak digitalisasi serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Kata kunci: Digitalisasi, Transparansi, Akuntabilitas, E-Government, Partisipasi Masyarakat

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>

*Correspondence: Iwan Ahmad

Puji Santoso

Email: iwansantoso209@gmail.com

Received: 13-03-2025

Accepted: 18-04-2025

Published: 21-05-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In the digital era, the implementation of digitalization in government is key to improving transparency and accountability in public governance. The use of information and communication technology (ICT) through e-Government systems, e-Services, and other digital platforms allows the government to provide faster, more efficient, and transparent services. This research aims to explore the role of digitalization in strengthening the principles of good governance, namely transparency, accountability, participation, and efficiency. By utilizing digital technology, the government can provide the public with greater access to important information, increase participation in decision-making, and speed up administrative processes. While digitalization provides many opportunities, challenges related to uneven infrastructure, low digital literacy, and cybersecurity threats remain significant obstacles. Therefore, this study proposes the need for collaboration between the government, society, and the private sector to strengthen the implementation of digitalization to create a more open, responsive, and accountable government. The methods used in this research include literature review and case analysis to provide an overview of the impact of digitization as well as recommendations for further development.

Keywords: Digitization, Transparency, Accountability, E-Government, Community Participation

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi digital telah menjadi katalis penting dalam perubahan tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong pemerintah untuk beralih dari sistem manual menuju sistem yang berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Digitalisasi dalam pemerintahan bukan hanya soal penyediaan layanan publik secara daring, tetapi juga mencakup bagaimana proses pengambilan keputusan, pengelolaan data, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan secara lebih terbuka dan partisipatif (Manik & Juwono, 2024).

Di Indonesia, penerapan *e-Government* dan berbagai inovasi digital seperti *e-Services*, *open data*, dan aplikasi pengaduan publik menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola yang lebih baik. Misalnya, keberadaan aplikasi LAPOR! dan sistem *e-budgeting* di berbagai daerah memungkinkan masyarakat untuk memantau dan berpartisipasi secara langsung dalam pengawasan kebijakan dan anggaran. Inovasi ini mendukung prinsip *good governance* yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi (Ardelia & Yuadi, 2023; Dian Fahriani et al., 2024).

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan teknis. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Kesenjangan akses internet serta rendahnya literasi digital di masyarakat menjadi hambatan serius dalam memastikan pemerataan manfaat dari kebijakan digital (Wulandari et al., 2024). Selain itu, keamanan data dan ancaman siber menjadi isu penting yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang digunakan (Sukomardojo et al., 2023).

Dari perspektif sosial-politik, adopsi teknologi digital juga menuntut perubahan budaya birokrasi. Proses digitalisasi tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga perubahan pola pikir di kalangan aparatur sipil negara untuk bertransformasi menjadi lebih adaptif dan inovatif. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membentuk ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan (Hidayat, 2024; Anggraini, 2023).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta merumuskan strategi kolaboratif yang dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas dalam pelayanan public (Bolang, 2014). Penerapan sistem e-Government dan e-Services memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan proses administratif, mengurangi birokrasi, dan memberikan layanan yang lebih cepat dan murah. Sebagai contoh, platform seperti SP4N-LAPOR di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan atau laporan langsung ke pemerintah, yang kemudian dapat diproses secara cepat dan transparan (Kristian et al., 2023). Teknologi juga mendukung pengelolaan data yang lebih terintegrasi, mempermudah pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta mempercepat pengambilan keputusan dengan data yang lebih akurat dan dapat diakses secara real-time. Digitalisasi meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik, memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemerintahan dan lebih mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan.

Prinsip Good Governance dalam Era Digital

Prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi semakin relevan dalam era digital. Transparansi dicapai melalui penggunaan teknologi yang memungkinkan publik mengakses informasi pemerintah dengan mudah dan terbuka, seperti laporan anggaran dan hasil kebijakan yang dipublikasikan secara daring (Ardelia & Yuadi, 2023). Akuntabilitas juga diperkuat melalui sistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik atau keluhan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi lebih mudah melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan atau menyuarakan opini mereka secara langsung. Sementara itu, efisiensi tercapai dengan pengurangan birokrasi dan proses yang lebih cepat berkat teknologi, yang meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi membuat pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang lebih terukur dan efisien (Dian Fahriani et al., 2024).

Pengaruh Digitalisasi terhadap Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat

Digitalisasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Manik & Juwono, 2024). Dengan adanya platform digital yang transparan, seperti open data dan e-Government, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, dan laporan kinerja pemerintah. Akses ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kebijakan public (Harahap & Harahap, 2023). Digitalisasi juga memperkuat partisipasi masyarakat, dengan menyediakan berbagai saluran bagi publik untuk menyampaikan pendapat, mengajukan keluhan, dan memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan. Aplikasi seperti LAPOR di Indonesia mempermudah masyarakat untuk melaporkan masalah secara langsung, yang kemudian diproses dengan cepat oleh instansi terkait (Anggraini, 2023). Teknologi ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengawasan sosial dan politik, memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan

transparansi tetapi juga mendorong interaksi yang lebih intens antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan partisipatif (Choirunnisa et al., 2023).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis kasus sebagai teknik utama. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena digitalisasi dalam pemerintahan melalui interpretasi terhadap data yang bersumber dari dokumen, literatur ilmiah, dan studi kasus implementasi digitalisasi di sektor publik. Objek penelitian dalam studi ini adalah implementasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian difokuskan pada beberapa praktik terbaik (*best practices*) dari pelaksanaan *e-Government*, *e-budgeting*, dan sistem pengaduan publik yang telah diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Bandung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, publikasi pemerintah, situs resmi lembaga pemerintahan, serta artikel-artikel relevan dari lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan telaah literatur. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mereview dokumen-dokumen yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi dokumen dan literatur secara sistematis untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antara digitalisasi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan secara logis dan objektif.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan akses informasi publik melalui platform digital merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Kusmiyati et al., 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di Indonesia telah mengembangkan berbagai sistem digital untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran, kebijakan, dan program-program pemerintah. Salah satu contoh konkret dari penerapan ini adalah Sistem Informasi Manajemen Anggaran (SIMAN) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana anggaran kota dialokasikan dan digunakan untuk berbagai keperluan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program sosial. Sebelumnya, masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan anggaran daerah, namun dengan adanya SIMAN, proses pengelolaan anggaran menjadi lebih terbuka dan dapat dipantau oleh siapa saja (Ajeng et al., 2023). Dalam konteks SIMAN, platform digital ini tidak hanya

menyediakan data anggaran, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau melaporkan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. Hal ini sangat membantu dalam menciptakan transparansi karena masyarakat bisa langsung memantau dan memberikan masukan terkait alokasi dan penggunaan dana publik (Firdaus et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa platform ini meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota, karena mereka merasa lebih terlibat dan memiliki akses langsung terhadap informasi yang sebelumnya mungkin tersembunyi atau sulit diakses. Dengan begitu, SIMAN menjadi alat yang memperkuat akuntabilitas pemerintahan dengan memberikan ruang bagi publik untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan secara lebih terbuka. Namun, meskipun penerapan platform digital seperti SIMAN memberikan banyak manfaat, tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang memadai (Wulandari et al., 2024). Masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital mungkin merasa kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi yang disajikan melalui platform tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan platform digital ini dengan baik (Yunus et al., 2024).

Digitalisasi pemerintahan telah membawa perubahan signifikan dalam hal efisiensi pengelolaan sumber daya dan anggaran (Mukhsin, 2020). Sebelumnya, proses pengelolaan anggaran dan sumber daya publik sering kali menghadapi tantangan besar terkait dengan ketidaktransparanan, birokrasi yang panjang, serta ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan. Namun, dengan adanya sistem digital seperti e-Budgeting yang diterapkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dan sumber daya menjadi lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipantau secara real-time. Salah satu contoh yang relevan adalah penerapan e-Budgeting di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem ini memungkinkan seluruh proses penganggaran dan pelaporan anggaran dilakukan secara digital, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga evaluasi. Dengan platform ini, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran—baik di tingkat daerah maupun pusat—dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara terbuka dan efisien (Binti et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan terkait implementasi e-Budgeting, ditemukan bahwa sistem ini mempercepat proses perencanaan dan pengesahan anggaran. Sebelumnya, pengajuan anggaran dan dokumen terkait sering memerlukan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak yang perlu menandatangani dokumen secara manual (Rachmawati Fauzia, 2023). Namun, dengan adanya e-Budgeting, semua data terkait anggaran dapat diakses dan diproses secara elektronik, yang mengurangi ketergantungan pada prosedur manual dan mempercepat proses pengesahan anggaran. Selain itu, e-Budgeting juga memudahkan dalam melakukan perubahan atau pembaruan anggaran secara real-time, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan yang ada (Kurnia & Soeratin, 2023). Di samping itu, sistem digital seperti e-Budgeting juga memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efisien, karena pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik. Pemerintah dapat

mengidentifikasi penggunaan dana yang tidak sesuai atau tidak efektif dengan lebih cepat, dan melakukan perbaikan jika diperlukan (Fikri, 2024). Platform ini juga memfasilitasi adanya pelaporan anggaran yang lebih transparan, yang pada gilirannya memperkecil peluang untuk terjadinya penyalahgunaan anggaran. Sebagai contoh, dalam penerapan e-Budgeting di Jakarta, ditemukan adanya penghematan dalam pengelolaan dana karena proses monitoring yang lebih terperinci dan teratur. Semua transaksi yang dilakukan dapat dilacak dan diaudit dengan lebih mudah, sehingga memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik (Nurrahman et al., 2021). Namun, meskipun sistem seperti e-Budgeting memberikan banyak keuntungan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan infrastruktur yang memadai dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang cukup. Tidak semua instansi pemerintahan memiliki SDM yang terlatih untuk mengoperasikan sistem digital ini secara maksimal, yang bisa memperlambat proses implementasi dan efektivitas sistem (Anjarwati & Kamil, 2024).

Digitalisasi pemerintahan tidak hanya berfokus pada transparansi dan efisiensi, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Arianto, 2023). Di era digital, berbagai platform dan aplikasi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah terlibat dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan publik. Salah satu contoh nyata adalah penerapan platform e-participation yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik, salah satunya adalah Sistem Pengaduan Layanan Publik (SIPP) yang diterapkan oleh pemerintah kota Bandung (Ningsih et al., 2024). Melalui platform ini, warga Bandung dapat memberikan masukan, saran, atau bahkan melaporkan masalah yang mereka temui dalam pelayanan publik secara langsung, yang kemudian dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan. Selain SIPP, ada pula platform seperti Musrenbang Online yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah (Irfan & Anirwan, 2023). Melalui platform ini, masyarakat bisa memberikan masukan secara langsung terkait dengan kebutuhan pembangunan daerah yang paling mendesak. Sebelumnya, proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) hanya dilakukan secara tatap muka di tingkat kelurahan atau kecamatan, yang terkadang terbatas pada kelompok tertentu saja (Sudrajat, 2024). Dengan adanya Musrenbang Online, masyarakat yang mungkin tidak bisa hadir secara fisik atau memiliki kendala geografis, dapat tetap berpartisipasi dengan memberikan pendapat mereka melalui media digital. Hal ini memastikan bahwa semua suara masyarakat dapat didengar tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Penerapan teknologi digital dalam partisipasi masyarakat ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah (Inzaghi et al., 2024). Dengan lebih banyaknya masyarakat yang terlibat, keputusan yang diambil menjadi lebih representatif dan mencerminkan kebutuhan serta harapan warga secara lebih akurat. Selain itu, penggunaan platform digital memungkinkan pengumpulan data secara lebih cepat dan akurat mengenai aspirasi masyarakat, yang bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran (Christover et al., 2023).

Simpulan

Digitalisasi telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti e-Government dan platform digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Sistem seperti SIMAN, e-Budgeting, dan platform pengaduan publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah, melaporkan keluhan, serta memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan digitalisasi, pemerintahan menjadi lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi digitalisasi juga menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat kesenjangan dalam infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah terpencil, serta rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat. Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian serius yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menjaga keamanan data agar digitalisasi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Saran

Untuk meningkatkan implementasi kolaborasi yang lebih efektif dalam digitalisasi pemerintahan, perlu adanya peningkatan sinergi antar sektor. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja lebih erat dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi. Kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan platform digital yang lebih efektif dan efisien, dengan memanfaatkan keahlian dari berbagai pihak. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap teknologi digital, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan dan berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan. Terakhir, pemerintah harus memperbaiki dan memperluas infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang tertinggal, serta memastikan jaringan internet yang stabil. Hal ini akan memastikan pemerataan akses terhadap platform digital di seluruh wilayah, sehingga digitalisasi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi lebih dalam mengenai dampak kolaborasi antar sektor dalam mempercepat implementasi e-Government.

Referensi

- Ajeng, D., Makalao, M., & Soeratin, H. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media. *Journal of Islamic Education Leadership*, 3(1), 28–50.
- Anggraini, D. (2023). UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI DIGITALISASI (STUDI KASUS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG). *Praja*, 11(2), 109–120. <http://mpp.palembang.go.id/>.

- Anjarwati, S., & Kamil, I. (2024). 25000-Article Text-80301-1-10-20240124. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 1163–1173.
- Ardelia, S. I. M., & Yuadi, I. (2023). Digital Government Dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik: Suatu Analisis berdasarkan Perspektif Bibliometrik. *Tibannbaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(2), 111–128. <https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937>
- Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106–127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Binti, R., Yuliana, R., Limarjani, S., & Misran, A. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDES Kayu Bawang. *ILUNG: Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*, 1(1), 47–58.
- Bolang, J. (2014). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Lex et Societatis*, II(9), 36–45.
- Choirunnisa, L., Hajar, T., Oktaviana, C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial PERAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95.
- Christover, D., Hidayattullah, A. S., & Mawarni, I. (2023). Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 199–214. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.73>
- Dian Fahriani, K., Afif Failany, M., & Fahriani, D. (2024). Artikel Praktek Kerja Lapang Akuntansi Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah. *PKLA*, 1(1), 1–6. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/pkla/>
- Fikri, A. (2024). DIGITALISASI UNTUK TRANSPARANSI KEUANGAN SEKOLAH DI MTs MA'ARIF NU 1 SUMBANG. *EDUTECH: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, 4(2), 67–74.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239.
- Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 769–776. <https://doi.org/10.29210/1202323208>
- Hidayat, E. W. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN. *JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF*, 23(2), 221–232.
- Inzaghi, M., Rahmadhan, W., Saputra, R. J., & Mubarak, A. (2024). NoLaJ Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan dan Pengawasan Tanah: Perspektif Hukum Agraria.

- Notary Law Journal, 3(1), 101–114.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253200000>.
- Irfan, & Anirwan. (2023). PELAYANAN PUBLIK ERA DIGITAL: STUDI LITERATUR DIGITAL ERA PUBLIC SERVICES: LITERATURE REVIEW Anirwan 2. IJI Publication, 4(1), 23–31.
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2023). PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG). JURNAL ACADEMIA PRAJA, 7(2), 252–263. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i2.2837>
- Kurnia, D. S., & Soeratin, H. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Suatu Institusi dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media dengan Kepemimpinan Manajemen Pendidikan Islam. ANWARUL, 3(4), 647–661. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i4.1277>
- Kusmiyati, R., Ginting, R., & Thariq, M. (2023). DIGITALISASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (PELUANG DAN TANTANGANNYA). KOMUNIKOLOGI:Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial, 7(1), 33–46.
- Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i1.1623>
- Mariano, S. (2023). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO. 1–16.
- Mukhsin. (2020). PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENERAPKAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PUBLIKASI INFORMASI DESA DI ERA GLOBALISASI. TEKNOKOM, 3(1), 7–15.
- Ningsih, F., Muarrifah, S., & Meliana, R. (2024). PERAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT. CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(2), 87–94.
- Nurrahman, A., Dimas, M., Falakhuddin Ma'sum, M., & Farhan Ino, M. (2021). PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, 3(1), 78–93. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>,
- Rachmawati Fauzia, N. (2023). PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, INTERNAL AUDITOR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DIMEDIASI AKUNTABILITAS PUBLIK (SURVEY DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN). Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi, 7(1), 43–52.
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PEMERINTAHAN MODERN. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(3), 403–422.

-
- Sudrajat, Y. (2024). Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1954–1965. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2169>
- Sukomardojo, T., Akbar, R. A., Aripin, Z., Amin, F., & Fatmawati, E. (2023). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Dampaknya terhadap Kesadaran Politik Ekonomi: Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Connected Community. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 196–204.
- Wulandari, M., Aprilla, W., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Yunus, Y., Alvionita, N., Maulana, F. A., & Firmansyah, M. T. (2024). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI ERA DIGITAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(5), 3179–3190.